

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan pelaksanaan desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001 menuntut setiap daerah untuk mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya secara lebih mandiri, dengan tujuan agar tata kelola pemerintahan daerah dapat terselenggara secara lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini, aspek keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau karena berkaitan langsung dengan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan pada setiap kabupaten/kota diarahkan agar daerah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara mandiri serta mendorong peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya secara optimal, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tingkat kemandirian daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana menjadi kebijakan pemerintah (Setiawan, 2024)

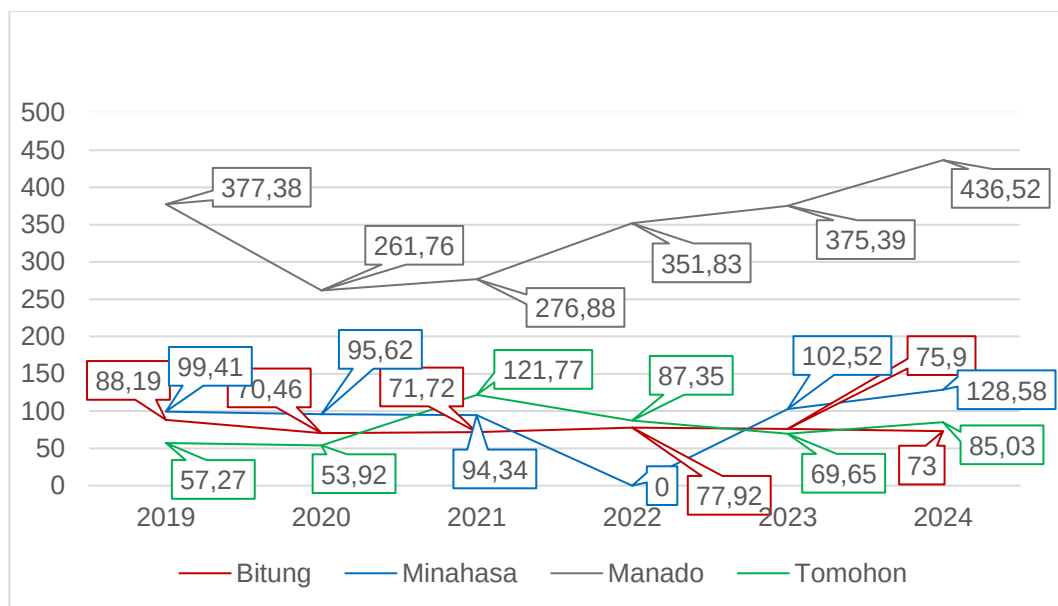
Keuangan daerah dapat diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara, pemerintah daerah yang lebih tinggi, maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola

sumber daya ekonomi yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut, karena PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah (Holung et. al, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonominya secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, optimalisasi PAD menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah (Fausi et. al, 2025) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut, sumber keuangan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Di antara berbagai sumber tersebut, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) merupakan sumber yang paling fundamental karena dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari potensi daerah sendiri, yang terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan mampu menjadi penopang utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; semakin besar kebutuhan daerah yang dapat dibiayai melalui PAD, maka semakin tinggi kualitas otonomi daerah tersebut, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah pun akan semakin kuat (Usman Regina, 2020).

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kawasan Metropolitan BIMINDO Tahun 2019 - 2024



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) 2019 -2024

Berdasarkan Gambar 1.1 mengenai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kawasan metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024 yang meliputi Kota Bitung,

Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon, menunjukkan bahwa realisasi PAD di setiap daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, Kota Manado menjadi wilayah dengan realisasi PAD tertinggi dibandingkan daerah lainnya, sedangkan Kota Tomohon dan Kota Bitung memiliki nilai PAD yang relatif lebih rendah namun cenderung stabil. Pada tahun 2019, Kota Manado mencatat realisasi PAD sebesar 377,38 miliar rupiah, disusul Kabupaten Minahasa sebesar 99,41 miliar rupiah, Kota Bitung sebesar 88,19 miliar rupiah, dan Kota Tomohon sebesar 57,27 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah di kawasan BIMINDO masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, pada tahun 2020 sebagian besar wilayah mengalami penurunan realisasi PAD akibat dampak pandemi yang melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kota Manado mengalami penurunan menjadi 261,76 miliar rupiah, Kota Bitung turun menjadi 70,46 miliar rupiah, dan Kota Tomohon menjadi 53,92 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Minahasa justru mengalami peningkatan menjadi 95,62 miliar rupiah. Penurunan PAD pada periode ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pajak daerah, retribusi, serta melemahnya sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2021, kondisi PAD mulai menunjukkan pemulihan di beberapa daerah. Kota Manado meningkat menjadi 276,88 miliar rupiah, Kota Tomohon mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai 121,77 miliar rupiah, dan Kota Bitung meningkat menjadi 71,72 miliar rupiah. Namun, Kabupaten Minahasa mengalami sedikit penurunan menjadi 94,34 miliar rupiah. Tahun 2022 menunjukkan kondisi yang beragam di setiap wilayah, di mana Kota Manado mengalami peningkatan cukup besar menjadi 351,83 miliar rupiah dan Kota Tomohon

mencapai 87,35 miliar rupiah. Kota Bitung berada pada angka 77,92 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Minahasa mengalami penurunan drastis hingga mencapai 0 miliar rupiah pada grafik, yang kemungkinan disebabkan oleh kendala pelaporan data atau penurunan penerimaan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, realisasi PAD kembali mengalami peningkatan di sebagian besar daerah. Kota Manado naik menjadi 375,39 miliar rupiah dan Kabupaten Minahasa meningkat menjadi 102,52 miliar rupiah, sedangkan Kota Tomohon berada pada angka 69,65 miliar rupiah dan Kota Bitung sebesar 73 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024, seluruh wilayah menunjukkan peningkatan PAD yang cukup baik, di mana Kota Manado kembali menjadi daerah dengan PAD tertinggi sebesar 436,52 miliar rupiah, diikuti Kabupaten Minahasa sebesar 128,58 miliar rupiah, Kota Tomohon sebesar 85,03 miliar rupiah, dan Kota Bitung sebesar 75,9 miliar rupiah. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD di kawasan metropolitan BIMINDO mengalami penurunan pada masa pandemi tahun 2020, kemudian berangsur pulih dan meningkat kembali pada periode 2021–2024, dengan Kota Manado sebagai wilayah yang memberikan kontribusi PAD terbesar selama periode tersebut.

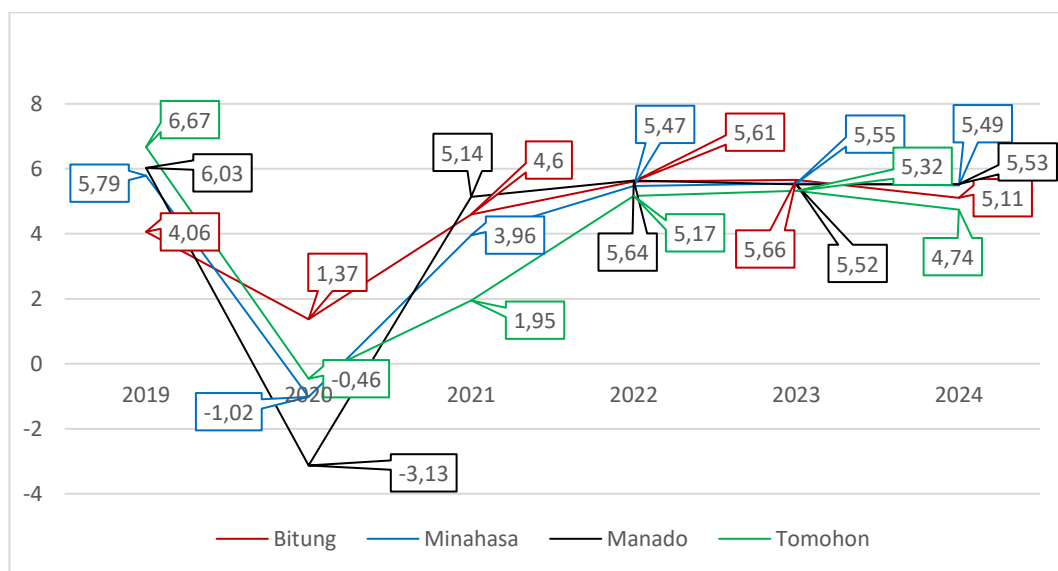
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan keuangan yang digali dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. PAD terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu komponen penting dalam PAD adalah retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan

usaha sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki kontraprestasi langsung berupa layanan atau fasilitas yang diterima oleh pihak yang membayar. Karena PAD bersumber dari kemampuan daerah sendiri, maka peningkatan PAD menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah serta memperkuat kemandirian fiskal (Elim2, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang mencerminkan perkembangan kapasitas produksi suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Konsep ini menekankan tiga aspek utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat dinamis, bukan sekadar gambaran kondisi ekonomi pada satu periode tertentu, sehingga menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan yang berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan output per kapita, yang berarti perlu memperhatikan dua sisi sekaligus, yaitu total output yang dihasilkan (GDP) serta jumlah penduduk sebagai pembagi untuk memperoleh pendapatan per kapita. Ketiga, pertumbuhan ekonomi memiliki perspektif jangka panjang, karena peningkatan kapasitas ekonomi umumnya terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama, seperti sepuluh, dua puluh, atau bahkan puluhan tahun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan sebagai proses peningkatan output per kapita dalam periode tertentu yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakatnya. Untuk

mengukurnya, digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional atau daerah (Gunawan & Suebah, 2022).

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Metropolitan BIMINDO Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Utara 2019 -2024

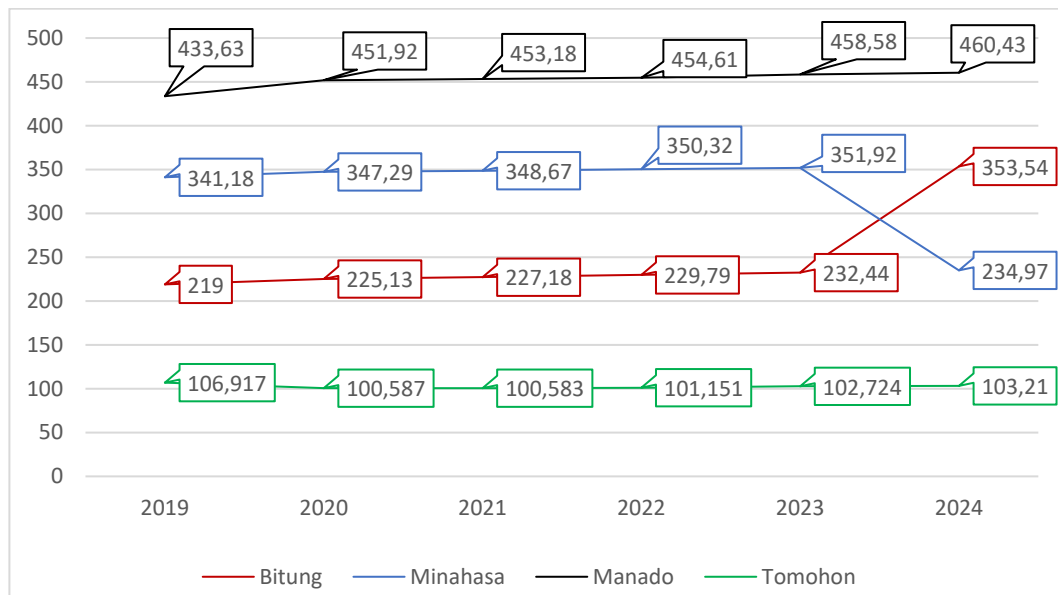
Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai pertumbuhan ekonomi di Kawasan Metropolitan BIMINDO yang meliputi Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2019, seluruh wilayah masih menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan tinggi, di mana Kota Tomohon mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67%, disusul Kota Manado sebesar 6,03%, Kabupaten Minahasa sebesar 5,79%, dan Kota Bitung sebesar 4,06%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa sebelum pandemi, aktivitas ekonomi di kawasan BIMINDO berkembang dengan baik. Namun, memasuki tahun 2020, seluruh daerah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi. Kota Manado mengalami penurunan paling tajam hingga mencapai -3,13%, sedangkan Kabupaten Minahasa turun menjadi -1,02%. Kota Tomohon dan Kota Bitung juga mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sekitar -0,46% dan 1,37%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya sektor perdagangan, pariwisata, jasa, serta terbatasnya mobilitas masyarakat. Pada tahun 2021, kondisi perekonomian mulai menunjukkan pemulihan. Kota Manado mencatat pertumbuhan sebesar 5,14%, Kota Bitung sebesar 4,6%, Kabupaten Minahasa sebesar 3,96%, sedangkan Kota Tomohon tumbuh sekitar 1,95%. Pemulihan ini terjadi seiring pelonggaran aktivitas ekonomi dan meningkatnya produksi serta konsumsi masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di kawasan BIMINDO mulai kembali stabil dan merata dengan rata-rata pertumbuhan berada di atas 5%, yaitu Kabupaten Minahasa sebesar 5,47%, Kota Manado sebesar 5,64%, Kota Tomohon sebesar 5,17%, dan Kota Bitung sebesar 5,61%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5%, dengan Kota Bitung tumbuh sebesar 5,66%, Kabupaten Minahasa dan Kota Manado masing-masing sebesar 5,52%, serta Kota Tomohon sekitar 5,5%. Sementara itu, pada tahun 2024 sebagian besar daerah masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun terjadi sedikit perlambatan di beberapa wilayah. Kabupaten Minahasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,49%, diikuti Kota Manado sebesar 5,53%, Kota Bitung sebesar 5,11%, dan Kota Tomohon sebesar 4,74%. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa kawasan

metropolitan BIMINDO mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun secara bertahap berhasil pulih sejak tahun 2021 hingga kembali stabil pada periode 2022–2024.

Faktor kedua yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena secara langsung memengaruhi potensi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Besar kecilnya pendapatan daerah pada dasarnya dapat ditentukan oleh jumlah penduduk, sebab semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula potensi objek pajak dan retribusi yang dapat dipungut, tentunya dengan dukungan kebijakan pemerintah yang efektif. Namun demikian, pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD tidak selalu bersifat positif, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan oleh komposisi penduduk yang beragam, tidak hanya terdiri dari penduduk yang bekerja dan memiliki penghasilan, tetapi juga ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, bayi, pengangguran, serta individu dengan keterbatasan fisik. Penduduk yang belum memasuki usia produktif atau tidak memiliki pendapatan tentu belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, sedangkan penduduk usia produktif yang bekerja dan memiliki penghasilan merupakan kelompok yang berpotensi menyumbang penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi (Andriansyah & Athoillah, 2024).

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Di Kawasan Metropolitan BIMINDO Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Utara 2019 -2024

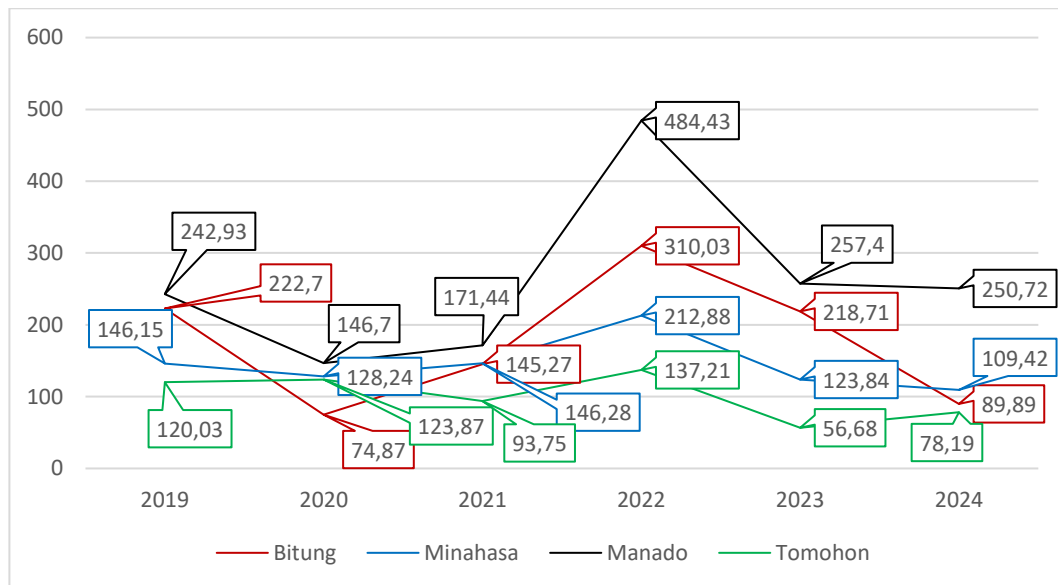
Berdasarkan Gambar 1.3 tentang jumlah penduduk di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024 yang meliputi Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di setiap wilayah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun terdapat beberapa fluktuasi kecil pada daerah tertentu. Secara umum, Kota Manado memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan Kota Tomohon memiliki jumlah penduduk paling sedikit di kawasan BIMINDO. Pada tahun 2019, Kota Manado mencatat jumlah penduduk tertinggi sebesar 433,63 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Minahasa sebesar 341,18 ribu jiwa, Kota Bitung sebesar 219 ribu jiwa, dan Kota Tomohon sebesar 106,917 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Manado

menjadi pusat konsentrasi penduduk di kawasan metropolitan BIMINDO karena perannya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di seluruh wilayah mengalami peningkatan, di mana Kota Manado meningkat menjadi 451,92 ribu jiwa, Kabupaten Minahasa menjadi 347,29 ribu jiwa, Kota Bitung mencapai 225,13 ribu jiwa, sedangkan Kota Tomohon sedikit menurun menjadi 100,587 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk pada sebagian besar wilayah dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk serta perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan. Tahun 2021 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan jumlah penduduk Kota Manado meningkat menjadi 453,18 ribu jiwa, Kabupaten Minahasa menjadi 348,67 ribu jiwa, dan Kota Bitung mencapai 227,18 ribu jiwa, sementara Kota Tomohon relatif stabil pada angka 100,583 ribu jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kembali mengalami peningkatan di seluruh wilayah, yaitu Kota Manado mencapai 454,61 ribu jiwa, Kabupaten Minahasa sebesar 350,32 ribu jiwa, Kota Bitung sebesar 229,79 ribu jiwa, dan Kota Tomohon sebesar 101,151 ribu jiwa. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang mendorong pertumbuhan penduduk di kawasan metropolitan. Pada tahun 2023, tren peningkatan jumlah penduduk masih berlanjut, di mana Kota Manado meningkat menjadi sekitar 457 ribu jiwa, Kabupaten Minahasa menjadi 351,92 ribu jiwa, Kota Bitung sebesar 232,44 ribu jiwa, dan Kota Tomohon sebesar 102,724 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2024, Kota Manado tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi sebesar 460,43 ribu jiwa. Kota Bitung mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 353,54 ribu jiwa berdasarkan grafik, sedangkan Kabupaten Minahasa tercatat sebesar 234,97 ribu jiwa dan Kota Tomohon sebesar

103,21 ribu jiwa. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kawasan metropolitan BIMINDO terus mengalami peningkatan selama periode 2019–2024, yang mencerminkan pertumbuhan kawasan perkotaan serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam rangka proses pembentukan modal dengan tujuan menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini diarahkan untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas aset yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, klasifikasi belanja modal juga mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan pemeliharaan aset, sepanjang pemeliharaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, serta memperpanjang masa manfaat aset yang dimiliki. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya berfungsi untuk menambah jumlah aset, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan nilai serta kinerja aset pemerintah daerah secara berkelanjutan (Warman & Arza, 2024).

Gambar 1.4 Realisasi Anggaran Belanja Modal Di Kawasan Metropolitan BIMINDO Tahun 2019 - 2024



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) 2019 -2024

Berdasarkan Gambar 1.4 mengenai realisasi anggaran belanja modal di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024 yang meliputi Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon, menunjukkan bahwa realisasi belanja modal di setiap daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, Kota Manado memiliki realisasi belanja modal tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan Kota Tomohon cenderung memiliki nilai yang lebih rendah. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan prioritas pembangunan daerah, kondisi ekonomi, serta dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2019, Kota Manado mencatat realisasi belanja modal tertinggi sebesar 242,93 miliar rupiah, diikuti Kota Bitung sebesar 222,7 miliar rupiah, Kabupaten Minahasa sebesar 146,15 miliar rupiah, dan Kota Tomohon

sebesar 120,03 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi, pemerintah daerah di kawasan BIMINDO masih aktif dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah. Namun, memasuki tahun 2020 seluruh daerah mengalami penurunan realisasi belanja modal akibat pandemi COVID-19. Kota Bitung mengalami penurunan cukup tajam menjadi 74,87 miliar rupiah, Kabupaten Minahasa turun menjadi 128,24 miliar rupiah, Kota Manado menjadi 146,7 miliar rupiah, dan Kota Tomohon menjadi 123,87 miliar rupiah. Penurunan tersebut terjadi karena sebagian besar anggaran daerah dialihkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021, realisasi belanja modal mulai menunjukkan kondisi yang bervariasi. Kota Manado meningkat menjadi 171,44 miliar rupiah dan Kota Bitung naik menjadi 145,27 miliar rupiah. Kabupaten Minahasa mengalami sedikit kenaikan menjadi 146,28 miliar rupiah, sedangkan Kota Tomohon mengalami penurunan menjadi 93,75 miliar rupiah. Tahun 2022 menjadi periode dengan peningkatan belanja modal yang cukup signifikan, terutama di Kota Manado dan Kota Bitung. Kota Manado mencatat realisasi tertinggi sebesar 484,43 miliar rupiah, Kota Bitung mencapai 310,03 miliar rupiah, Kabupaten Minahasa sebesar 212,88 miliar rupiah, dan Kota Tomohon sebesar 137,21 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi pemerintah daerah pasca pandemi. Pada tahun 2023, sebagian besar daerah kembali mengalami penurunan realisasi belanja modal. Kota Manado turun menjadi 257,4 miliar rupiah, Kota Bitung menjadi 218,71 miliar rupiah, Kabupaten Minahasa menjadi 123,84 miliar rupiah, dan Kota Tomohon turun cukup signifikan menjadi 56,68 miliar rupiah. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian prioritas

anggaran dan efisiensi belanja daerah. Selanjutnya pada tahun 2024, realisasi belanja modal di kawasan BIMINDO menunjukkan kondisi yang beragam. Kota Manado masih menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi sebesar 250,72 miliar rupiah, diikuti Kabupaten Minahasa sebesar 109,42 miliar rupiah, Kota Bitung sebesar 89,89 miliar rupiah, dan Kota Tomohon sebesar 78,19 miliar rupiah. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja modal di kawasan metropolitan BIMINDO mengalami penurunan pada masa pandemi tahun 2020, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 sebagai bagian dari pemulihan pembangunan daerah, sebelum kembali mengalami penyesuaian pada periode 2023–2024. Kota Manado menjadi daerah dengan realisasi belanja modal terbesar selama periode tersebut, yang mencerminkan perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan di kawasan BIMINDO.

Fenomena ini memunculkan permasalahan adanya perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO yang meliputi Manado, Kab Minahasa Bitung Dan Tomohon selama periode 2019–2024. Meskipun keempat daerah tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi dan kemudian menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, peningkatan tersebut tidak selalu diiringi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil di setiap wilayah. Kota Manado secara konsisten mencatat realisasi PAD tertinggi dibandingkan tiga daerah lainnya, sementara Kabupaten Minahasa menunjukkan peningkatan secara bertahap sedangkan Kota Bitung justru mengalami fluktuasi bahkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan Kota Tomohon juga mengalami fluktuasi bahkan penurunan dalam beberapa

tahun terakhir . Selain itu, dinamika jumlah penduduk yang berbeda antar daerah serta realisasi belanja modal yang cenderung berfluktuasi sesuai kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan masing-masing pemerintah daerah semakin memperlihatkan adanya ketimpangan kemampuan keuangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan belanja modal benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk menguji keterkaitan ketiga faktor tersebut terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kawasan BIMINDO.

Kesenjangan penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena penelitian sebelumnya belum banyak yang secara khusus meneliti hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kemandirian keuangan daerah, terutama pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor lain seperti Pendapatan Asli Daerah, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi sebagai penentu kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran jumlah penduduk dalam mendukung kemandirian keuangan daerah.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis terhadap keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah

penduduk, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di kawasan metropolitan bimindo tahun 2019 – 2024. Dengan mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Kawasan Metropolitan Bimindo Tahun 2019 – 2024”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024?
2. Apakah jumlah penduduk (X2) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024?
3. Apakah belanja modal (X3) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Belanja Modal Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Kawasan Metropolitan BIMINDO Tahun 2019–2024?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh parsial pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh parsial jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh parsial belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan BIMINDO tahun 2019–2024.
4. Untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Jumlah Penduduk (X_2), Dan Belanja Modal (X_3), secara Simultan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Kawasan Metropolitan BIMINDO Tahun 2019–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut.

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang ekonomi publik dan keuangan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, belanja modal, serta kemandirian keuangan daerah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam referensi akademik dan bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya pada pemerintah daerah di kawasan metropolitan.

Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah di kawasan metropolitan bimindo, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pertumbuhan ekonomi, pengelolaan kependudukan, dan efektivitas belanja modal.
2. penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan wawasan dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
3. Bagi peneliti dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya dengan variabel, periode, maupun wilayah yang berbeda.

1.5 Batasan penelitian

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di kawasan metropolitan bimindo tahun 2019 – 2024. Untuk

memudahkan analisis dan menjaga fokus penelitian maka ruang lingkup batasan yang di terapkan sevbagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menganalisis data dalam tahun 2019-2024 sehingga dinamika sebelum atau sesudah periode tersebut tidak di ikut sertakan.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah metropolitan sarbagita sebagai area kajian utama sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat di jadikan acuan untuk wilayah di luar metropolitan atau metropolitan dengan ciri yang berbeda.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).